

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARJO I LANTAI 2

JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 2-4 JAKARTA 10710

TELEPON: (021) 3994230 (20 SALURAN) PSW 5200,5204, (021) 3450959, 3865130 FAKSIMILI: (021) 3846402

SITUS: www.djpbn.kemenkeu.go.id

PENGUMUMAN NOMOR PENG- 5 /PB/2018

TENTANG

PELAKSANAAN SERTIFIKASI BENDAHARA PADA SATUAN KERJA PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PERIODE II TAHUN 2018

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.05/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.05/2017, Kementerian Keuangan Republik Indonesia akan melaksanakan Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Periode II Tahun 2018 melalui mekanisme sebagai berikut:

A. SYARAT-SYARAT PENDAFTARAN

I. Mekanisme pengakuan Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Bendahara dan/atau Sertifikat Profesi Bendahara

Bagi calon peserta yang menduduki jabatan Bendahara dan yang tidak sedang menduduki jabatan Bendahara:

- a. Pegawai Negeri Sipil (PNS), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI);
- b. Pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat;
- c. Golongan paling rendah II/b atau sederajat; dan
- d. Memiliki salah satu dari sertifikat sebagai berikut:
 - Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Bendahara yang diterbitkan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan sebelum tanggal 20 Januari 2016;
 - Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Bendahara yang diterbitkan oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan lainnya sebelum tanggal 20 Januari 2016;
 - 3) Sertifikat Profesi Bendahara yang masih berlaku dan diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) **sebelum tanggal 20 Januari 2016**.
- II. Mekanisme Ujian Sertifikasi Internet-based Test (IBT)

Bagi Bendahara dengan masa kerja paling singkat selama 2 tahun:

 a. Pegawai Negeri Sipil (PNS), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI);

- b. Pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat;
- c. Golongan paling rendah II/b atau sederajat; dan
- d. Telah memiliki sertifikat diklat bendahara yang diterbitkan oleh lembaga diklat selain BPPK atau sertifikat profesi Bendahara yang masih berlaku namun tidak dapat diakui dan diterbitkan Sertifikat Bendahara dengan Nomor Register, atau tidak memiliki sertifikat diklat bendahara atau sertifikat profesi bendahara yang masih berlaku.

III. Mekanisme Ujian Sertifikasi Computer-based Test (CBT) yang terintegrasi dengan Penyegaran (Refreshment)

Bagi Bendahara dengan masa kerja kurang dari 2 tahun :

- a. Pegawai Negeri Sipil (PNS), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI);
- b. Pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat;
- c. Golongan paling rendah II/b atau sederajat; dan
- d. Telah memiliki sertifikat diklat bendahara yang diterbitkan oleh lembaga diklat selain BPPK atau sertifikat profesi Bendahara yang masih berlaku namun tidak dapat diakui dan diterbitkan Sertifikat Bendahara dengan Nomor Register, atau tidak memiliki sertifikat diklat bendahara atau sertifikat profesi bendahara yang masih berlaku.

IV. Mekanisme Ujian Sertifikasi Computer-based Test (CBT) yang terintegrasi Diklat Bendahara

Bagi Calon Bendahara yang tidak sedang menduduki jabatan Bendahara :

- a. Pegawai Negeri Sipil (PNS), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI);
- b. Pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat;
- c. Golongan paling rendah II/b atau sederajat; dan
- d. Pendaftaran dilakukan hanya melalui BPPK selaku penyelenggara diklat dan ujian sertifikasi secara kolektif oleh masing-masing kementerian / lembaga.

B. TATA CARA PENDAFTARAN

- 1. Pendaftaran Sertifikasi Bendahara dilakukan di Unit Pelaksana Sertifikasi (UPS) mulai tanggal 2 sampai dengan 30 April 2018.
- Pelaksanaan ujian sertifikasi bendahara dilakukan di Unit Pelaksana Sertifikasi pada bulan Mei 2018.
- Tata cara pendaftaran Sertifikasi Bendahara sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.05/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.05/2017.
- Calon peserta sertifikasi bendahara wajib membaca peraturan sebagaimana dimaksud angka 3.
- 5. Format surat usulan nama calon peserta sertifikasi bendahara dan dokumen lainnya yang terkait dengan pendaftaran Sertifikasi Bendahara dapat diperoleh di UPS atau diunduh melalui situs http://www.dipbn.kemenkeu.go.id.

- 6. Pengisian surat usulan nama calon peserta sertifikasi bendahara dan kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran dilakukan sesuai dengan petunjuk pengisian.
- 7. Adapun ketentuan dan dokumen persyaratan pendaftaran yang perlu disampaikan pada UPS adalah sebagai berikut:
 - 1) Persyaratan Umum
 - a) Surat usulan nama calon peserta sertifikasi dari kepala satuan kerja; dan
 - b) Softcopy pas foto berwarna terbaru dengan latar belakang merah dalam format JPG.

2) Persyaratan Tambahan

- a) Softcopy sertifikat diklat bendahara yang diterbitkan oleh BPPK yang telah dilegalisir oleh pejabat yang menangani kepegawaian bagi calon peserta yang memiliki sertifikat diklat dimaksud, dengan format PDF;
- Softcopy sertifikat diklat bendahara yang diterbitkan oleh lembaga diklat lainnya yang telah dilegalisir oleh pejabat yang menangani kepegawaian bagi calon peserta yang memiliki sertifikat diklat dimaksud, dengan format PDF; dan/atau
- c) Softcopy sertifikat profesi bendahara yang masih berlaku yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang telah dilegalisir oleh pejabat yang menangani kepegawaian bagi calon peserta yang memiliki sertifikat profesi dimaksud, dengan format PDF.
- 8. UPS melakukan verifikasi data calon peserta melalui Aplikasi SIMSERBA dengan alamat http://simserba.kemenkeu.go.id
- Dalam hal data calon peserta yang telah sesuai, UPS menerbitkan dan menyampaikan username dan password Aplikasi SIMSERBA kepada calon peserta melalui Aplikasi SIMSERBA.
- 10. Dalam hal data calon peserta tidak sesuai, UPS mengembalikan surat usulan kepada kepala satker.
- 11. Calon peserta yang telah memperoleh *username* dan *password* Aplikasi SIMSERBA merekam data diri dan mengunggah *softcopy* dokumen persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 6 melalui Aplikasi SIMSERBA.
- 12. UPS melakukan verifikasi data terhadap dokumen yang diunggah oleh calon peserta melalui Aplikasi SIMSERBA.
- 13. UPS menyampaikan hasil verifikasi data calon peserta sebagaimana dimaksud pada angka 11 kepada Unit Penyelenggara.
- 14. Calon peserta dapat melihat status pendaftaran, mekanisme sertifikasi yang diikuti, dan lokasi ujian melalui Aplikasi SIMSERBA.

C. UNIT PELAKSANA SERTIFIKASI (UPS)

Daftar Unit Pelaksana Sertifikasi adalah sebagai berikut:

No.	Provinsi	UPS	
1.	Aceh	KPPN Banda Aceh	
		2. KPPN Lhokseumawe	
		3. KPPN Meulaboh	
		4. KPPN Langsa	
		5. KPPN Tapaktuan	
		6. KPPN Kutacane	

		7. KPPN Takengon
2.	Sumatera Utara	KPPN Medan I
2.	Curriatora Ctara	2. KPPN Medan II
		KPPN Tebingtinggi
		KPPN Pematang Siantar
		KPPN Padang Sidempuan
		6. KPPN Tanjung Balai
		7. KPPN Gunung Sitoli
		8. KPPN Rantau Prapat
		9. KPPN Sibolga
		10. KPPN Sidikalang
	Competens Denst	11. KPPN Balige
3.	Sumatera Barat	KPPN Padang KPPN Pukittingsi
		KPPN Bukittinggi KPPN Solok
		4. KPPN Lubuk Sikaping
		5. KPPN Sijunjung
		6. KPPN Palnan
4.	Riau	KPPN Pekanbaru KPPN Perasi
		2. KPPN Dumai
		3. KPPN Rengat
5.	Kepulauan Riau	KPPN Tanjung Pinang
		2. KPPN Batam
6.	Jambi	1. KPPN Jambi
		2. KPPN Bangko
		KPPN Sungai Penuh
		4. KPPN Muara Bungo
		5. KPPN Kuala Tungkal
7.	Sumatera Selatan	KPPN Palembang
		KPPN Baturaja
		3. KPPN Lahat
		4. KPPN Sekayu
		5. KPPN Lubuk Linggau
8.	Bandar Lampung	KPPN Bandar Lampung
		KPPN Metro
		3. KPPN Kotabumi
		4. KPPN Liwa
9.	Bengkulu	KPPN Bengkulu
		2. KPPN Curup
		3. KPPN Mukomuko
		4. KPPN Manna
10.	Bangka Belitung	KPPN Pangkal Pinang
		KPPN Tanjung Pandan
11.	Banten	KPPN Serang
		2. KPPN Tangerang
		3. KPPN Rangkasbitung
12.	DKI Jakarta	1. KPPN Jakarta I
1.7/1.2.2.2		2. KPPN Jakarta II
		3. KPPN Jakarta III
		4. KPPN Jakarta IV
		5. KPPN Jakarta V
		6. KPPN Jakarta VI
		7. KPPN Jakarta VII
13.	Jawa Barat	KPPN Bandung I
		2. KPPN Bandung II
		3. KPPN Bekasi
		4. KPPN Bogor

		5. KPPN Sukabumi
		6. KPPN Cirebon
		7. KPPN Tasikmalaya
		8. KPPN Kuningan
		9. KPPN Purwakarta
		10. KPPN Garut
		11. KPPN Karawang
		12. KPPN Sumedang
14.	Jawa Tengah	KPPN Semarang I
		KPPN Semarang II
		3. KPPN Surakarta
		4. KPPN Pati
		5. KPPN Kudus
		6. KPPN Pekalongan
		7. KPPN Tegal
		8. KPPN Purwokerto
		9. KPPN Magelang
		10. KPPN Klaten
		11. KPPN Sragen
		12. KPPN Purworejo
		13. KPPN Purwodadi
		14. KPPN Banjarnegara
		15. KPPN Cilacap
15.	D.I. Yogyakarta	KPPN Yogyakarta
	0,	2. KPPN Wonosari
		3. KPPN Wates
16.	Jawa Timur	KPPN Surabaya I
		2. KPPN Surabaya II
		3. KPPN Sidoarjo
		4. KPPN Malang
		5. KPPN Pamekasan
		6. KPPN Bondowoso
		7. KPPN Madiun
		8. KPPN Kediri
		9. KPPN Blitar
		10. KPPN Mojokerto
		11. KPPN Jember
		12. KPPN Bojonegoro
		13. KPPN Banyuwangi
		14. KPPN Tuban
		15. KPPN Pacitan
17.	Kalimantan Barat	KPPN Pontianak
		2. KPPN Singkawang
		3. KPPN Sanggau
		4. KPPN Ketapang
		5. KPPN Sintang
		6. KPPN Putussibau
18.	Kalimantan Tengah	KPPN Palangkaraya
		2. KPPN Buntok
		3. KPPN Pangkalan Bun
		4. KPPN Sampit
19.	Kalimantan Selatan	KPPN Banjarmasin
19.	Taminaritari Ociatari	2. KPPN Tanjung
		3. KPPN Barabai
		4. KPPN Pelaihari
		5. KPPN Kotabaru

20.	Kalimantan Timur	KPPN Samarinda KPPN Balikpapan KPPN Tariyan Badah
21.	Bali	KPPN Tanjung Redeb KPPN Denpasar KPPN Singaraja
22.	Nusa Tenggara Barat	 KPPN Amlapura KPPN Mataram KPPN Bima KPPN Selong KPPN Sumbawa Besar
23.	Nusa Tenggara Timur	 KPPN Kupang KPPN Waingapu KPPN Ruteng KPPN Atambua KPPN Larantuka KPPN Ende
24.	Sulawesi Selatan	 KPPN Makassar I KPPN Makassar II KPPN Pare-Pare KPPN Palopo KPPN Bantaeng KPPN Sinjai KPPN Benteng KPPN Watampone KPPN Makale
25.	Sulawesi Barat	KPPN Mamuju KPPN Majene
26.	Sulawesi Tengah	 KPPN Palu KPPN Poso KPPN Luwuk KPPN Tolitoli
27.	Sulawesi Tenggara	1. KPPN Kendari 2. KPPN Bau-Bau 3. KPPN Raha 4. KPPN Kolaka
28.	Gorontalo	KPPN Gorontalo KPPN Marisa
29.	Sulawesi Utara	 KPPN Manado KPPN Kotamobagu KPPN Bitung KPPN Tahuna
30.	Maluku Utara	KPPN Ternate KPPN Tobelo
31.	Maluku	1. KPPN Ambon 2. KPPN Masohi 3. KPPN Tual 4. KPPN Saumlaki
32.	Papua Barat	KPPN Manokwari KPPN Sorong KPPN Fak-Fak
33.	Papua	 KPPN Jayapura KPPN Merauke KPPN Biak KPPN Serui KPPN Nabire KPPN Wamena

		7. KPPN Timika
34.	Kalimantan Utara	KPPN Tanjung Selor
		2. KPPN Tarakan
		KPPN Nunukan
35.	Badan Pendidikan	Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan
	dan Pelatihan	2. BDK Cimahi
	Keuangan	3. BDK Yogyakarta
		4. BDK Malang
		5. BDK Denpasar
		6. BDK Manado
		7. BDK Makasar
		8. BDK Balikpapan
		9. BDK Palembang
		10. BDK Pekanbaru
		11. BDK Medan

D. PENGUMUMAN HASIL SERTIFIKASI BENDAHARA

Informasi pengumuman hasil sertifikasi bendahara dapat dilihat pada Unit Pelaksana Sertifikasi dan situs http://www.djpbn.kemenkeu.go.id.

E. LAIN-LAIN

- Penerbitan Sertifikat Bendahara dengan Nomor Register bagi peserta yang telah memenuhi syarat akan dilakukan oleh Unit Penyelenggara.
- Apabila membutuhkan informasi lebih lanjut terkait dengan proses pendaftaran, calon peserta dapat menghubungi Sekretariat Unit Penyelenggara Sertifikasi Bendahara melalui telepon: (021) 3846822 atau e-mail: sertifikasi.bendahara@kemenkeu.go.id atau Unit Pelaksana Sertifikasi setempat.

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal ²³ Maret 2018

Direktur Jenderal Perbendaharaan Direktur Sistem Perbendaharaan,

DIVESIA

WIWIENG HANDAYANINGSIH